



LAPORAN SINGKAT

KOMISI VIII DPR-RI

BERMITRA DENGAN KEMENTERIAN AGAMA, KEMENTERIAN SOSIAL, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI), BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI (BPKH), BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS), DAN BADAN WAKAF INDONESIA (BWI).

Rapat Ke : 8
Tahun Sidang : 2017-2018
Masa Persidangan : I
Jenis Rapat / Ke- : Rapat Dengar Pendapat / Ke-1
Dengan : Ketua Dewan Pengawas dan Ketua Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Kamis, 14 September 2017
Waktu : Pukul 16.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II Lantai 1
Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270
Ketua Rapat : **Dr. H.M. Ali Taher, S.H., M. Hum.**
Sekretaris Rapat : Yanto Supriyanto, S.H.
Acara : Rencana Kerja dan Biaya Operasional BPKH
Hadir : 1. ... orang dari 48 orang Anggota Komisi VIII DPR-RI
2. Ketua Dewan Pengawas dan Ketua Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji

I. PENDAHULUAN:

1. Sesuai dengan ketentuan Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib Pasal 251 ayat (2), Ketua Rapat membuka Rapat Kerja pada pukul 16.16 WIB.
2. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR RI, Dr. H.M. Ali Taher, S.H., M.Hum. pada tempat dan acara sesuai tersebut diatas.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI dengan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksanan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), membahas “**Rencana Kerja dan Biaya Operasional BPKH**”, disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI mendorong BPKH untuk mempercepat penyelesaian peraturan pelaksanaan dari UU No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji dengan mengintensifkan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait.
2. Komisi VIII DPR RI akan melakukan pendalaman lebih lanjut terhadap:
 - a. Usulan biaya operasional BPKH periode transisi untuk Juni – Desember tahun 2017 sebesar Rp32.997.060.800,- (*tiga puluh dua miliar sembilan ratus sembilan puluh juta enam puluh ribu delapan ratus rupiah*).
 - b. Rencana strategis BPKH Tahun 2018 – 2022 dan program kerja BPKH tahun 2017.

Oleh karena itu, Komisi VIII DPR meminta BPKH untuk menyiapkan data pendukung usulan biaya operasional dan menyempurnakan rencana strategis dan program kerja BPKH dengan memprioritaskan kepentingan jemaah haji untuk dibahas kembali dengan Komisi VIII DPR RI pada rapat selanjutnya.

III. P E N U T U P

Rapat ditutup pukul 18.20 WIB.

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI
KETUA,**

ttd

DR. H.M. ALI TAHER SH., M.Hum